

Sudewo Tolak Mundur

Dari Halaman 1

"Saya kan dipilih rakyat secara konstitusional dan secara demokratis, jadi tidak bisa saya berhenti dengan tuntutan itu, semua ada mekanismenya," ujar Sudewo di Kantor Bupati Pati, Rabu (13/8).

Demo besar yang melibatkan ribuan warga Pati hari ini mengusung tuntutan Sudewo mundur dari jabatannya.

Tuntutan muncul setelah Sudewo menaikkan pajak bumi dan bangunan (PBB) hingga 250 persen. Sudewo juga sempat menantang warga yang memprotes kebijakan itu untuk menggelar

demo.

Kebijakan itu kemudian dia anulir, Sudewo juga telah minta maaf atas pernyataannya. Namun, warga tetap menuntut Sudewo mundur dalam demo hari ini yang diwarnai keriuhan.

Tuntutan massa aksi hari ini mendapat dukungan dari DPRD Kabupaten Pati. Fraksi yang mendukung antara lain PKS, Gerindra, Demokrat hingga PKB.

DPRD Kabupaten Pati sepakat bentuk pansus untuk pemakzulan Sudewo. Dukungan DPRD Kabupaten Pati setelah massa aksi berhasil menduduki gedung dewan.

Sudewo menyatakan dirinya menghormati hak angket yang disepakati oleh DPRD Pati.

"Itu kan hak angket yang dimiliki DPRD, jadi saya menghormati hak angket tersebut, paripurna tersebut," ujarnya.

Menurutnya demo hari ini menjadi pembelajaran bagi dirinya. Dia berjanji akan lebih baik lagi dan berharap agar warga Pati menjaga soliditas.

"Ini pembelajaran bagi seluruh masyarakat Pati untuk menjaga soliditas, menjaga kekompatan jangan sampai terprovokasi siapapun. Jadi Pati ini adalah milik semuanya, yang harus menjaga Kabupaten Pati siapa? Ya warga Pati, saya harap ini jadi pembelajaran bagi warga Pati dan untuk saya," lanjutnya. (cnni/js)

Demo Maut Pemakzulan...

Dari Halaman 1

Rabu (13/8), dikutip dari detik.com. Ketua DPRD Pati, Ali Badrudi turut mengucapkan bela sungkawa atas korban jiwa. Ali sempat meminta doa para anggota DPRD yang menjadi korban jiwa.

"Para anggota DPRD Pati untuk mendoakan para korban pada aksi ini. Semoga diampuni oleh Allah," jelasnya.

Saat dikonfirmasi, Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto mengatakan akan mengecek informasi tersebut. "Saya cek dulu" kata dia. (det/js)

Dilempari Botol

Dari Halaman 1

hadapan masa depan Kantor Bupati Pati, Jawa Tengah, dikutip dari detik.com.

Tak lama bicara, massa kembali ricuh dengan melempari Sudewo dengan botol air mineral hingga sandal. Sudewo lantas kembali masuk dalam mobil dan kembali ke dalam kantor Bupati Pati.

Tampak seorang ajudan Sudewo memasang badan untuk menangkis lemparan botol massa. Ajudan berkemeja putih itu menggunakan tameng milik polisi.

Terlihat massa masih ada yang bertahan di depan Kantor Bupati Pati. Sebagian pintu gerbang terbuka dengan penjagaan ketat oleh petugas kepolisian. (det/js)

DPRD Sepakati Hak

Dari Halaman 1

pansus pemakzulan Bupati Pati. Ketua Fraksi PKS, Nerso mengatakan, ada alasan mengajukan pemakzulan. Seperti polemik pengisian direktur rumah sakit dan soal anggaran.

"Pengisian direktur Rumah Sakit Soewondo dan pergeseran anggaran 2025," kata Nerso.

Anggota DPRD dari Partai Demokrat, Joni Kurnianto, juga mengatakan hal sama.

"Hak angket untuk Bupati karena telah sudah melanggar janji sumpah dari Bupati Pati. Dan muncul kegaduhan di Pati. Hak angket segera terpenuhi," jelasnya.

Dari Fraksi Gerindra, Yeti menyarankan hak angket untuk memastikan pemerintah transparan untuk berjalan yang kondusif Pati Bumi Mina Tani.

Fraksi PKB Mahdun juga melihat bahwa Bupati tidak berpihak kepada masyarakat.

"Proses penetapan terkait kenaikan pajak PBB yang dilakukan, meskipun dibatalkan, efek menimbulkan kegaduhan saat ini," dia menjelaskan.

"Sehingga pemerintahan dapat berhati-hati melakukan kebijakan," lanjut dia.

Ketua DPRD Pati, Ali Badrudi, akhirnya mengetok untuk membuat hak angket mengenai usulan pembentukan pansus pemakzulan Bupati Pati, Sudewo.

"Rapat paripurna mengenai tentang kebijakan Bupati Pati. Pengembangan pada saat terbentuk pansus untuk mengusut kebijakan Bupati Pati," jelasnya. (det/js)



KPK Periksa Wali Kota Padangsidimpuan

Dari Halaman 1

miliar rupiah. Hari ini, KPK melakukan pemeriksaan terhadap Wali Kota Padangsidimpuan, Letnan Dalimunthe, sebagai saksi.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan, pemeriksaan dilakukan di Kantor KPPN Padangsidimpuan, Jalan Kenanga, Kelurahan Ujung Padangsidimpuan, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan.

"Pemeriksaan ini terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di wilayah Sumatera Utara," ujar Budi kepada wartawan, Rabu (13/8/2025).

Selain Letnan Dalimunthe, KPK juga memanggil 17 saksi lain yang berasal dari berbagai latar belakang, termasuk mantan wali kota, pejabat dinas, dan pihak swasta.

Berikut Daftar Saksi yang Diperiksa KPK: Mantan Wali Kota Padangsidimpuan, Irsan Efendi Nasution
Komisaris PT Dalihan Natolu Grup (DNG),

Taufik Hidayat Lubis Bendahara PT DNG, Mariam

Pegawai PT DNG, Anggi Harahap Direktur PT Taufik Prima Duta Putra, Rinaldi Lubis alias Aldi

Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Pemko Padangsidimpuan, Siti Humairo Hasibuan Bendahara Dinas PUPR Kota Padangsidimpuan, Muhammad Harris (Acong) Staf Bidang Bina Marga, Sandi Karyawan PT DNG, Leman PNS, Zulkifli Lubis alias Mamak Utom PNS, Addi Mawardi Harahap Kabid/PPK Dinas PUPR Padang Lawas Utara, Ikhsan Harahap Plt Kepala PUPR Padang Lawas Utara, Hendrik Gunawan Harahap Kepala Bagian PBJ Padang Lawas Utara, Asnawi Harahap

Kadis PUPR Padang Lawas Utara 2021-2024, Ramlan

Kadis PUPR Tapanuli Selatan, Fachri Ananda Harahap

Kabid Bina Marga II Dinas PUPR Tapanuli Selatan, Oskar Hendra Dauly

KPK belum memerinci materi pemeriksaan terhadap para saksi ini. Namun, penyelidikan kasus ini merupakan tindak lanjut dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada Juni lalu.

Dalam OTT tersebut, KPK menetapkan 5 tersangka, yakni:

Topan Ginting (TOP) – Kadis PUPR Provinsi Sumut

Rasuli Efendi Siregar (RES) – Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut

Heliyanto (HEL) – PPK Satker PJN Wilayah I Sumut

M Akhirun Pilang (KIR) – Direktur Utama PT DNG

M Rayhan Dulamsi Pilang (RAY) – Direktur PT RN

KPK menduga Topan Ginting mengatur pemenang lelang proyek untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Ia disebut menerima janji fee sebesar Rp8 miliar dari perusahaan swasta yang dimenangkan dalam proyek jalan senilai Rp 231,8 miliar tersebut. (mbd/js)

Pemprov Sumut Pastikan Kesiapan Aquabike

Dari Halaman 1

22-24 Agustus 2025. Pada tahun ini, penyelenggaraan Aquabike hanya akan diselenggarakan di Balige, Kabupaten Toba.

"Pemprov mendukung penuh penyelenggaraan event internasional ini, apalagi kita tahu dampak positif event ini kan besar, dari tahun ke tahun baik," kata Sekdaprov Sumut Togap Simangunsong saat rapat koordinasi persiapan Aquabike Jetski World Championship dan F1 Powerboat di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro 30 Medan, Senin (11/8/2025).

Adapun dukungan Pemprov Sumut pada penyelenggaraan event tersebut diantaranya koordinasi dan sinkronisasi, pendanaan, dukungan teknis, pengaturan jadwal, standarisasi biaya

dan pengawasan, pengembangan infrastruktur, serta fasilitas pendukung, pengelolaan administrasi dan perizinan, dan promosi dan publikasi.

Tentunya penyelenggaraan event internasional ini tidak berjalan sendiri. Seluruh pihak di Sumut mulai Forkopimda dan Pemerintah Kabupaten Toba bersama-sama menyukseskan kegiatan ini.

"Kita harap kegiatan ini dapat berjalan sebagaimana mestinya, sukses, itu akan meningkatkan kunjungan wisatawan dan perekonomian di Sumut," kata Togap.

Pada tahun ini ada 53 riders yang akan berlaga di Aquabike. Sementara Pada F1 Powerboat akan ada 24 driver yang turut serta. Pada tahun ini akan ada peserta nasional yang turut dalam Aquabike Jetski World Championship.

Sementara itu Wakil Direktur Mandalika Grand Prix Association (MGPA) Samsul Purba mengatakan sejauh ini persentase persiapan untuk Aquabike Jetski World Championship sudah mencapai 90-95 %. Logistik sebagian besar sudah tiba di Balige, Kabupaten Toba.

"Ini tahun ketiga, tahun-tahun lalu berjalan lancar, dan eksposuranya sesuai dengan yang kita harapkan, untuk persiapan, secara umum kami siap, logistik sudah sebagian besar tiba di lapangan, persentasenya sudah di posisi mendekati 90 hingga 95 %," kata Samsul.

Turut hadir pada rapat tersebut Wakil Bupati Toba Audi Murphy Sitorus, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Effendy Pohan, Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yuda Pratiwi Setiawan. ** (A-05)

Dewan K3 Sumut Minta Polisi Periksa PT Sumo

Dari Halaman 1

reklame tersebut: PT. Sumo. Desakan itu disampaikan Ketua Komisi 3 Dewan K3 Provinsi Sumatera Utara T. M. Yusuf. Kepada awak media, Rabu (13/8/2025), ia mengatakan,

"Saya minta agar pihak kepolisian segera mengusut tuntas kasus papan reklame yang menelan korban tersebut," desak Yusuf.

Selain itu, pihaknya juga akan meminta Was-

naker UPT 1 Disnaker Sumatera Utara melakukan sidak ke PT Sumo terkait Sistem Manajemen K3 dalam pemasangan papan reklame.

"Sebab, kami menduga PT Sumo lalai dalam pemeliharaan papan reklame yang memakan korban dan meresahkan warga sekitar ini," sebutnya.

Menurutnya, Kota Medan saat ini sudah menjadi hutan reklame, sehingga merusak estetika dari ibukota Sumatera Utara ini.

"Kita juga akan menyurati Disnaker Sumut

mempertanyakan SMK3 PT Sumo," pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, papan reklame yang tumbang tersebut telah menimpa 3 unit mobil, gerobak sate, 7 unit kereta dan rumah warga.

"Jam tujuh malam, papan reklamenya sudah goyang goyang bang, dan kemudian ambruk menimpa mobil, kereta, gerobak sate bahkan rumah warga," ungkap juru parkir di Jalan H. Zainul Arifin, Selasa (12/8/2025). (A-10)

Jalan Tanpa Trotoar, Pejalan Kaki Terabaikan

Dari Halaman 1

kanan dan kiri. Seolah-olah semua pengendara diizinkan melaju semauanya. Dan begitulah keadaannya.

Terlebih bila angkot melintas. Sudah jadi rahasia umum, para sopir angkutan kota di wilayah ini kerap ugali-ugalan. Mereka berlomba dengan waktu, bukan demi pelayanan, tapi demi mengejar setoran. Di jalanan seperti ini, penumpang yang ingin cepat sampai dan sopir yang ingin cepat penuh bisa jadi kombinasi paling berbahaya—bukan hanya bagi mereka, tapi juga bagi siapa saja yang kebetulan berjalan di sisi jalan.

Belum cukup? Coba amati di setiap persimpangan. Anda mungkin mengira akan menemukan lampu lalu lintas seperti di kota-kota lainnya. Tapi jangan berharap. Di titik-titik krusial, persimpangan justru jadi arena rebutan jalur. Semua kendaraan merasa punya hak untuk lewat duluan. Tak ada sistem. Tak ada petugas. Tak ada sinyal lampu merah. Yang ada hanya suara klakson dan keberanian menekan pedal gas lebih dulu.

Pada jam-jam tertentu, terutama pagi dan sore, kemacetan pun menjadi ritual harian. Ia

bukan lagi hal yang luar biasa, tapi sesuatu yang telah dianggap biasa. Seperti adzan di masjid—hanya saja ini adzan dari klakson yang bersahutan, dari deru knalpot yang kelelahan.

Padahal kita bicara tentang wilayah Kabupaten Deli Serdang. Bukan pelosok, bukan pula kabupaten baru. Ini wilayah strategis yang berbatasan langsung dengan Medan, yang dilewati ribuan kendaraan setiap hari. Tapi infrastruktur dasarnya justru miskin perencanaan, lemah pengawasan, dan nyaris tanpa empati pada pejalan kaki.

Dan sayangnya, Jalan Besar Tembung bukan satu-satunya lokasi yang menyisakan pejalan kaki tanpa ruang aman. Di banyak titik pinggiran Deliserdang di desa maupun kecamatan, trotoar tak pernah direncanakan. Dan jika pun ada, sering kali berubah fungsi menjadi tempat parkir atau lapak pedagang. Pejalan kaki terpaksa berjalan di badan jalan, bukan karena pilihan, tapi karena terabaikan. Ini seakan menjadi cermin nyata bahwa pembangunan lebih berpihak kepada kendaraan ketimbang manusia.

Trotoar itu bukan ornamen. Ia bukan sekadar bagian cantik dari jalan raya. Ia simbol penghargaan terhadap keselamatan manusia. Jika bahkan ruang berjalan kaki tak disediakan, apa artinya pembangunan? Pembangunan untuk

siapa?

Kalau di atas jalan saja rakyat tak diberi ruang untuk berjalan aman, bagaimana bisa mereka melangkah dengan yakin dalam hidupnya? Dan jika pada persoalan sejelas ini tak ada tindakan nyata, maka jangan heran kalau rakyat mulai berpikir: mungkin pemerintah memang sedang sibuk membangun jalan-jalan menuju baliho, bukan ke arah keselamatan rakyat.

Islam mengajarkan bahwa keselamatan jiwa (hifzhun nafs) adalah salah satu dari lima maqashid utama syariat. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman: "Barang siapa membunuh satu jiwa, seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia." (QS. Al-Ma'idah: 32)

Jika satu lubang bisa membuat sepeda motor tergelincir, jika satu ruas jalan bisa merenggut nyawa, dan jika satu trotoar yang hilang bisa membuat seorang anak terjungkal ke parit, maka ini bukan lagi soal teknis pembangunan—ini soal pelanggaran terhadap amanah paling asasi: menjaga keselamatan jiwa.

Dan pemimpin yang abai terhadap keselamatan rakyatnya, sejatinya sedang berjalan di atas jalan yang lebih berbahaya daripada sekadar jalan tanpa trotoar. Ia sedang berjalan di atas jalan yang bisa menjerumuskannya pada pertanggungjawabannya akhirnya. (*)



Dari Halaman 1

seharusnya memperluas ruang dialog malah menyisakan duka dan kemarahan.

Tragedi ini mencerminkan tiga persoalan mendasar. Pertama, krisis legitimasi politik. Publik Pati tidak sekuat mempersoalkan "apa" yang dilakukan DPRD, tetapi "bagaimana" proses itu dijalankan. Ketika pemakzulan dianggap sarat intrik politik dan minim transparansi, warga sulit menerima hasilnya, bahkan jika prosedur hukum telah ditempuh. Legitimasi bukan hanya soal hukum, tapi juga kepercayaan sosial.

Kedua, gagalnya manajemen konflik dan komunikasi publik. Konflik politik adalah kemiscayaan, tetapi ia tidak harus memakan korban jiwa. Dalam teori komunikasi krisis, pemerintah daerah dan aparat keamanan memiliki tanggung jawab untuk membuka saluran komunikasi yang menenangkan, bukan memanaskan. Dialog publik, mediasi terbuka, dan penjelasan yang jujur seharusnya menjadi langkah awal sebelum amarah massa membesar.

Ketiga, kultur politik konfrontatif. Demokrasi lokal kita sering kali diwarnai oleh politik jalanan yang berpotensi menjadi ajang bentrokan fisik. Demonstrasi adalah hak konstitusional, tetapi ketika ruang deliberasi politik tertutup rapat, jalanan menjadi panggung utama. Sayangnya, panggung ini sering diwarnai kekerasan yang mematikan.

Tragedi di Pati seharusnya menjadi titik balik. Demokrasi lokal tidak boleh terus dibiarkan berjalan di jalur keras seperti ini. Ada beberapa langkah yang patut dipertimbangkan.

Pertama, DPRD dan pemerintah daerah wajib membangun protokol komunikasi politik dalam isu-isu sensitif seperti pemakzulan. Protokol ini mencakup transparansi dokumen, penjelasan publik berkala, dan ruang partisipasi warga sebelum keputusan final diambil.

Kedua, aparat keamanan perlu mengutamakan pendekatan humanis dalam pengendalian massa. Penegakan hukum tidak boleh lepas dari penghormatan terhadap nyawa manusia. Penggunaan kekuatan harus benar-benar proporsional dan menjadi opsi terakhir.

Ketiga, pendidikan politik warga harus diperkuat. Masyarakat perlu memahami prosedur demokrasi sekaligus memiliki saluran aspirasi yang aman dan legal. Di sisi lain, elit politik harus menyadari bahwa mereka bekerja bukan hanya untuk memenangkan fraksi atau kelompoknya, tetapi untuk menjaga kohesi sosial masyarakat yang mereka wakili.

Sejarah demokrasi menunjukkan, kekerasan politik di tingkat lokal dapat meninggalkan luka sosial yang panjang. Luka ini bisa menjadi bara dalam sekam, memicu konflik lanjutan setiap kali ada isu baru yang memanas. Oleh karena itu, akuntabilitas menjadi kunci: penyelidikan independen atas korban jiwa dan evaluasi menyeluruh atas proses pemakzulan harus segera dilakukan.

Kita perlu mengingat bahwa demokrasi bukan sekadar hak memilih dan dipilih. Ia adalah seni mengelola perbedaan tanpa mengorbankan kemanusiaan. Pati kini menjadi pengingat pahit: ketika komunikasi politik gagal, demokrasi bisa berubah menjadi tragedi.